

BAB II

HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA- THAILAND

Thailand merupakan salah satu negara di wilayah Asia Tenggara yang menarik untuk dikaji sebagai fenomena hubungan internasional. Pada masa kolonisasi bangsa Eropa, Thailand difungsikan sebagai pembatas, sehingga negara ini belum pernah dijajah sekalipun oleh kolonialis Eropa. Kebudayaan dan kemajuan pada bidang pariwisata menjadikan Thailand menjadi penting sebagai patner kerjasama bilateral dengan Indonesia.

Keberadaan Indonesia dan Thailand sebagai negara yang terletak di wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara kemudian mendasari hubungan bilateral di kedua belah pihak, baik bidang sosial, ekonomi ataupun kebudayaan, termasuk berkontribusi dalam keanggotaan ASEAN. Pada bab II ini akan diuraikan lebih lanjut tentang profil Thailand dan dinamika kerjasama dengan Indonesia, meliputi sejarah dan perkembangannya.

A. Profil Thailand

Thailand memiliki beberapa wilayah geografis yang berbeda dengan negara lain di wilayah Asia Tenggara yang umumnya memiliki karakter sebagai negara kepulauan. Di sebelah utara, keadaannya bergunung-gunung, dan gunung tertinggi di Thailand berada di Doi Inthanon (2.576 mdpl). Sebelah timur laut terdiri dari Hamparan Khorat, yang dibatasi di timur oleh sungai Mekong. Letak geografis Thailand adalah: berbatasan dengan Laos dan Myanmar di sebelah utara, dengan Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dengan Myanmar dan Laut Timur di barat dan

dengan Laos dan Kamboja di timur.¹ Gambara tentang wilayah geografis Thailand lihat peta 2.1. sebagai berikut:



Peta 2. 1 Geografis Thailand

Sumber: *Maps of Thailand*,
<https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/th.htm>, diakses pada 30 Desember 2017.

Thailand memiliki beberapa wilayah geografis yang berbeda. Di sebelah utara, keadaannya bergunung-gunung, dan gunung tertinggi di Thailand berada di Doi Inthanon (2.576 mdpl). Sebelah timur laut terdiri dari Hamparan Khorat, yang dibatasi di timur oleh sungai Mekong. Wilayah tengah negara didominasi lembah sungai Chao Phraya yang hampir seluruhnya datar, dan mengalir ke Teluk Thailand. Di sebelah

¹ *Thailand Country Profile*, <http://www.bbc.com/news/world-asia-15581957>, diakses pada tanggal 29 Desember 2017.

selatan terdapat Tanah Genting Kra yang melebar ke Semenanjung Melayu.²

Cuaca setempat adalah tropis dan bercirikan monsun. Ada monsun hujan, hangat dan berawan dari sebelah barat daya antara pertengahan Mei dan September, serta monsun yang kering dan sejuk dari sebelah timur laut dari November hingga pertengahan Maret. Tanah genting di sebelah selatan selalu panas dan lembap. Kota-kota besar selain ibu kota Bangkok termasuk Nakhon Ratchasima, Nakhon Sawan, Chiang Mai, dan Songkhla.³

Thailand merupakan sebuah negara yang sistem pemerintahannya menggunakan pola monarkhi konstitusional. Keberadaan Raja hanya bersifat simbolis sebagai pelindung umat beragama, sedangkan kepemimpinan nasional dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih secara demokratis, melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang dijalankan secara periodik sebagai media yang berperan penting dalam penyalur aspirasi dan kepentingan masyarakat Thailand. Pada tahun 2012 jumlah penduduk Thailand mencapai 65 juta jiwa. Secara kependudukan negara tersusun secara multi-etnis, yang terdiri dari etnis Thai sebesar 75 persen, etnis Cina sebesar 14 persen dan etnis melayu sekitar 3 persen yang sebagian besar tinggal di daerah perkotaan.

Pada tahun 1980-an, perekonomian Thailand berjalan stabil dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9% per tahun. Stabilitasnya perekonomian Thailand saat itu mendorong banyak perusahaan swasta di Thailand untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dengan melakukan *leveraging*, mengajukan kredit usaha besar-besaran ke bank-bank di negara maju seperti Jepang. Karena melihat tren perekonomian Thailand yang stabil secara makro, bank-bank di Jepang dengan sangat mudah

² Thomas A. Rumney, *The Geography of Southeast Asia*, Rowman and Littlefield, London and New York, 2015, hal.29.

³ *Ibid.*

mengucurkan kredit tanpa memperhatikan fundamental perusahaan debitur. Artinya, perbankan di Jepang telah mengucurkan kredit Ponzi ke berbagai perusahaan di Thailand.⁴

Pada tahun 1996, tibalah masa jatuh tempo pembayaran utang perusahaan-perusahaan swasta di Thailand. Karena pada saat itu banyak perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka timbullah ketidakpercayaan di kalangan perbankan Jepang terhadap kapabilitas perusahaan Thailand. Beberapa bank Jepang mempercepat jatuh tempo pembayaran utang. Akibatnya, masa jatuh tempo pelunasan utang terakumulasi dalam periode yang sama. Pada tahun yang sama (1996), hedge fund Amerika Serikat menjual US\$400 juta ke Thailand. Awal tahun 1997, nilai mata uang Baht jatuh karena tingginya permintaan terhadap Dollar AS. Perusahaan swasta yang memiliki utang jatuh tempo pada tahun 1997 semakin kesulitan mengembalikan pinjaman karena Baht yang menurun tajam.⁵

Ketidakkampuan perusahaan swasta Thailand dalam memenuhi kewajibannya membuat nilai saham perusahaan-perusahaan itu jatuh. Karena banyak nilai saham perusahaan yang anjlok, secara otomatis membuat pasar modal Thailand anjlok pula hingga 75%. Dimulailah krisis finansial di Thailand pada 2 Juli 1997. Finance One (perusahaan keuangan terbesar di Thailand) ikut mengalami kebangkrutan. Pada 11 Agustus 1997, IMF menawarkan paket “penyelamatan” untuk Thailand dengan menyediakan dana lebih dari US\$ 16 milyar. Namun, akhirnya pada 20 Agustus IMF menyetujui pencairan paket “penyelamatan” sebesar US\$ 3,9 milyar. Paket “penyelamatan” yang dikucurkan IMF segera menunjukkan aksinya. Bulan Januari 1998, Baht jatuh ke titik terendahnya: 56 Baht per US\$,

⁴ Erick Overdall NS, *The Road of Sustainable Growth*, International Monetary Fund Publishing, 2012, hal.8.

⁵ *Ibid.*

padahal sejak 1985 hingga 2 Juli 1997 Baht dipatok pada harga 25 Baht per US\$.⁶

Pada bulan Juli 1997, krisis moneter pertama-tama meletus di Thailand, kemudian menjalar dengan cepat mempengaruhi sejumlah besar negara dan daerah di Asia. Krisis ini adalah krisis ekonomi yang melanda di kawasan Asia untuk pertama kalinya. Krisis ini disulut oleh keputusan pemerintahan PM Chavalith Yongchaiyud untuk mengambangkan nilai tukar bath Thailand terhadap mata uang US dollar pada tanggal 2 Juli 1997. Kebijakan ini adalah refleksi dari ketidakmampuan pemerintahan PM Chavalith dalam mencegah dan mengatasi krisis ekonomi secara ekonomis dan politis.⁷

Terjadinya krisis ekonomi Thailand telah menggambarkan bahwa terjadinya krisis ekonomi diawali oleh pembentukan *Bangkok International Banking Facillities* (BIBIF) pada tahun 1993. Krisis itu juga diawali oleh sikap pengabaian terhadap berbagai gejala krisis ekonomi yang telah terjadi sejak awal 1997. Berbagai kelemahan kebijakan ekonomi memicu timbulnya banyak masalah seperti semakin berkurangnya pemasukan dari sektor ekspor, *booming sector property*, semakin tingginya hutang luar negeri dari pihak swasta domestik. Tidak hanya itu saja. Timbul juga masalah semakin naiknya nilai riil mata uang bath terhadap dollar AS, masalah defisit neraca perdagangan serta banyaknya *non-performing loans* (NPLs) di sektor perbankan.

Pemerintahan Thaksin yang mulai menjabat pada Februari 2001 dengan maksud menstimulasi permintaan domestik dan mengurangi ketergantungan Thailand kepada perdagangan dan investasi asing. Sejak itu, administrasi

⁶ "Recovery on the Asia Crisis and the Role of IMF", <https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/062300.htm#box1>, diakses pada tanggal 26 Februari 2018.

⁷ Christopher John Baker and Pasut Phongpaisit, *The Capital After The 1997 After Crisis*, Silkworm Book, Singapore, 2008, hal.37.

Thaksin telah memperbaiki pesan ekonominya dengan mengambil ekonomi "jalur ganda" yang menggabungkan stimulan domestik dengan promosi tradisional Thailand tentang pasar terbuka dan investasi asing. Ekspor yang lemah menahan pertumbuhan PDB pada 2001 hingga 1,9%. Namun pada 2002-2003 stimulan domestik dan kembalinya ekspor menambah performa yang semakin baik, dengan pertumbuhan PDB pada 5,3% dan 6,3%.⁸

Melalui berbagai kebijakan ekonomi yang mengedepankan ekspor, industri kreatif dan pariwisata pada akhirnya berhasil membawa dampak positif bagi kemajuan perekonomian Thailand. Hal ini dapat dilihat dari tren perkembangan GDP (*gross domestic product*) yang terus meningkat. Gambaran tentang hal ini lihat tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perkembangan GDP Thailand Tahun 2000-2007

No.	Tahun	Jumlah GDP (Milyar US Dollar)
1.	2001	115.536
2.	2002	126.887
3.	2003	142.640
4.	2004	161.340
5.	2005	176.352.
6.	2006	207.209
7.	2007	246.977

Sumber: Anonim, "Thailand: World Economic Database", Data Outlook International Monetary Fund (IMF), New York, 2012.

⁸ *Ibid.*

Pemerintah Kerajaan Thailand menyambut investasi asing, dan investor yang bisa memenuhi beberapa persyaratan dapat mendaftar hak investasi istimewa melalui Dewan Investasi Thailand (*Thailand Investation Council*) untuk menarik investasi asing lainnya, pemerintah telah memodifikasi peraturan investasinya. Gerakan serikat buruh tetap lemah dan terpecah-pecah di Thailand. Hanya 3% dari seluruh angkatan kerja tergabung dalam serikat buruh. Pada tahun 2000, Undang-undang Hubungan Kerja-Perusahaan Negara (*SELRA*) disahkan, hingga memberikan para pegawai sektor publik hak-hak yang sama dengan mereka yang bekerja di sektor swasta, termasuk hak untuk bergabung dengan serikat buruh. Sekitar 60% dari seluruh angkatan kerja Thailand dipekerjakan di bidang pertanian. Beras adalah hasil bumi yang paling penting. Thailand adalah eksportir besar di pasar beras dunia. Komoditi pertanian lainnya yang dihasilkan dengan jumlah yang cukup besar adalah ikan dan produk-produk perikanan lainnya, tapioka, karet, biji-bijian, dan gula. Ekspor makanan jadi seperti tuna kaleng, nenas dan udang beku juga sedang meningkat.

Meningkatkan eksportnya. Pertumbuhan ekspor tahun 2002 Thailand tercatat sudah mengalami kenaikan sebesar 2,8%. Ekspor berkontribusi sekitar 60% dari total nilai PDB Thailand, sehingga pertumbuhan ekonomi Thailand turut terangkat cepat. Pada tahun itu juga Thailand telah membayar lunas utangnya sebesar 17 miliar USD ke IMF. Pertimbangannya, Thailand tidak ingin terbebani bunga pinjaman dari IMF yang sekitar 2,9% per tahun. Alasan lain adalah bahwa perekonomian Thailand semakin tumbuh mantap dan investasi asing sudah berdatangan, sehingga tidak memerlukan bantuan dana IMF.⁹

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, Thailand mengalokasikan pengeluaran yang lebih besar daripada penerimaannya. Anggaran defisit pemerintahan Thailand pada tahun 2002 sekitar 3,4%, sengaja ditingkatkan dari 0,8% pada

⁹ IMF, *opcit*

tahun 2001. Kebijakan ekspansif sektor fiskal itu memungkinkan permintaan domestik pada perekonomian Thailand meningkat, karena porsi belanja modal lebih tinggi daripada belanja untuk keperluan lain dan belanja modal itu lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan prasarana yang menyerap lapangan kerja banyak sehingga mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduk termasuk petani yang produknya mengalami peningkatan permintaan.

Hanya empat tahun setelah krisis, Thailand telah berada di urutan ke-5 dari 10 besar negara di Asia Pasifik yang menerima aliran investasi asing langsung terbanyak, setelah Cina, Hongkong, Singapura, dan Taiwan. Saat itu, Thailand menerima aliran FDI masuk sebesar 3,8 miliar USD, cukup signifikan untuk mengembalikan perekonomian Thailand seperti sebelum krisis. Namun laju ekonomi Thailand kemudian melambat. Seperti halnya Indonesia, pertumbuhan ekonomi Thailand sangat sensitif terhadap gejolak harga minyak. Harga BBM meningkatkan inflasi dan suku bunga. Tahun 2006 ekonomi Thailand mencatat pertumbuhan sekitar 4,2% tidak jauh berbeda dengan 4,5% pada tahun 2005. Pertumbuhan ini adalah yang paling lambat dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

B. Dinamika Kerjasama Indonesia-Thailand

Hubungan antara Indonesia dan Thailand ternyata telah melalui serangkaian sejarah panjang yang berawal dari masa kerajaan Sriwijaya, Majapahit hingga kontribusi para tokoh nasional kedua negara dalam pembentukan ASEAN. Seiring dengan berkembangnya waktu, hubungan antara Indonesia dan Thailand semakin intensif yang ditandai dengan pencapaian berbagai kontrak kerjasama.

Pada tahun 2006-2016 hubungan Indonesia-Thailand dihadapkan pada berbagai pencapaian, diantaranya kerjasama bidang pertanian, penanganan pencurian ikan (*illegal fishing*)

pemberantasan narkotika hingga pariwisata. Ini membuktikan bahwa kerjasama bilateral kedua negara telah mengarah pada *trouble shooter capacity*, sehingga antara Indonesia dan Thailand keduanya dapat saling melengkapi.

1. Sejarah Kerjasama Kerjasama Indonesia-Thailand

Hubungan Indonesia dan Thailand telah berlangsung sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Melalui pertukaran peradaban, masyarakat kedua bangsa telah terhubung melalui seni budaya, agama, arsitektur, dan karya sastra. Hubungan diplomatik Indonesia-Thailand berlangsung sejak tanggal 7 Maret 1950. Kerja sama antara kedua negara berlangsung di berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, iptek, dan budaya. Hubungan ini diperluas lagi dengan adanya saling kunjung antara pemimpin kedua negara.¹⁰

Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Bangkok pertama kali didirikan pada tahun 1947 dengan nama Indonesian Office (INDOFF) yang pada waktu itu dipimpin oleh Izak Mahdi dengan stafnya antara lain; Abdullah Kamil dan R. Tamtomo. Kantor INDOFF yang terletak di Pyapipat Lane, Jalan Silom, Bangkok, pada jaman revolusi dijadikan sebagai markas untuk kegiatan-kegiatan perjuangan Republik Indonesia. Adam Malik (mantan Wakil Presiden RI) bersama rekan-rekan pejuang lainnya, pernah berkumpul dan menginap di gedung tersebut.

Dengan mengambil tempat di gedung INDOFF, pada tanggal 27 Desember 1949, kurang lebih sekitar 1000 orang Indonesia yang berada di Thailand secara spontan menyambut Hari Penyerahan Kedaulatan Indonesia dari Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada tahun itu pula,

¹⁰ *Hubungan Bilateral Indonesia-Thailand*, <https://www.kemlu.go.id/bangkok/id/Pages/Thailand.aspx>, diakses pada 31 Desember 2017.

status Perwakilan RI ditingkatkan menjadi Kedutaan. Dalam bulan Januari 1950, Kantor Kedutaan kemudian pindah ke jalan Silom no. 349, sementara pada tahun yang sama, Kuasa Usaha Izak Mahdi mendapat tugas untuk membuka Perwakilan Indonesia di Peking, China, sehingga tugas di Bangkok dipercayakan kepada Kuasa Usaha Malikuswari Muchtar Prabunegara sampai tahun 1952.

Sejak tahun 1952, Kantor Kedutaan Indonesia pindah ke tempat yang baru di 600 – 602 Petchburi Road, Bangkok (hingga saat ini). Pada tanggal 23 Pebruari 1952, pemerintah Indonesia secara resmi menempatkan Duta Besar RI pertama di Bangkok. Gedung Kedutaan, berikut rumah kediaman Kepala Perwakilan RI dibeli oleh pemerintah Indonesia dari Pangeran Chumpot Paribatra pada bulan Februari 1952, seharga 7 juta baht (sekitar US\$ 350.000), sedangkan status tanahnya yang memiliki luas 22.724meter persegi adalah tanah “*erfpacht*” untuk kurun waktu selama 75 tahun.¹¹

Pada tanggal 1 Januari 1956, status Perwakilan RI di Bangkok ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Pada tanggal 9 Januari 1962, Duta Besar Isman meresmikan peletakan batu pertama yang menandai dimulainya pembangunan sebagian kompleks KBRI, dengan gedung baru kantor KBRI yang pembangunannya selesai pada bulan September 1962. Selama berlangsungnya pembangunan gedung baru, kantor KBRI untuk sementara menyewa sebuah gedung yang terletak di jalan Phayathai no. 75, Bangkok. Gedung KBRI di Petchburi Road pada waktu itu merupakan satu-satunya gedung termodern jika dibandingkan dengan gedung-gedung kantor perwakilan asing lainnya yang berada di Bangkok.¹²

¹¹ Sejarah Thailand, <http://maritimtours.com/info-sejarah-thailand.html>, diakses pada tanggal 2 Januari 2017.

¹² Ibid.

Dalam kompleks gedung KBRI, selain terdapat ruangan kerja bagi tiap-tiap fungsi, ruang rapat, ruang pertemuan, ruang kerja Kepala Perwakilan dan staf lainnya, juga terdapat Wisma Indonesia yang merupakan tempat kediaman Kepala Perwakilan yang dilengkapi dengan Guest House. Disamping itu, komplek KBRI juga dilengkapi dengan gedung olah raga, lapangan tenis, masjid As-Safier, kantin Dharma Wanita Persatuan, perpustakaan dan Sekolah Indonesia Bangkok (SIB).

2. Perkembangan Kerjasama Indonesia-Thailand

Perkembangan hubungan antara Indonesia dan Thailand dapat berkembang secara progresif. Payung utama kegiatan kerjasama bilateral antara kedua negara adalah forum Komisi Bersama yang dibentuk setelah ditandatanganinya Persetujuan Kerjasama Ekonomi dan Teknik RI-Thailand di tahun 1992. Dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama RI-Thailand yang berlangsung pada 16-18 Januari 2008 di Petchaburi, Thailand telah dibahas beberapa permasalahan bilateral yang akan terus dikembangkan oleh kedua negara antara lain meliputi masalah: ekonomi, perdagangan, transportasi, pendidikan dan kebudayaan, investasi, perikanan, pariwisata, energi, kerjasama teknik, dan kerjasama IMT-GT. Pada pertemuan Komisi Bersama RI-Thailand sebelumnya (ke-5) di Yogyakarta pada 2003, disepakati mengubah nama *The Joint Commission on Economic and Technical Cooperation between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand* menjadi *The Joint Commission between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand*.¹³

Hubungan bilateral RI dengan Thailand selama ini telah berlangsung dengan baik. Kedekatan hubungan ini dapat dilihat dari pertemuan dan saling kunjung para pemimpin dan pejabat

¹³ Overview of Indonesia-Thailand: KBRI Bangkok, <https://www.kemlu.go.id/bangkok/en/profil.aspx>, diakses pada 2 Januari 2017.

tinggi kedua negara, antara lain pertemuan bilateral Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan PM Yingluck Shinawatra di sela-sela Bali Democracy Forum V, 8 November 2012; kunjungan PM Yingluck Shinawatra ke Indonesia dalam rangka menghadiri KTT APEC pada 7-8 November 2013; kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Thailand dalam rangka menghadiri World Economic Forum on East Asia (WEFEA) tahun 2012; pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan PM Prayut Chan-o-cha di sela-sela peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA), 23 April 2015 di Jakarta; serta kunjungan Presiden Joko Widodo ke Bangkok pada 25 Oktober 2017 untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Mending Raja Bhumibol Adulyadej (Raja Rama IX).

Kedekatan hubungan antara Indonesia dan Thailand juga dapat dilihat dari intensitas pertemuan dan kunjungan kenegaraan diantara kedua negara yang meningkat dari tahun 2008-2015. Pertemuan ini dijalankan oleh pejabat setingkat menteri atau di atasnya untuk membahas berbagai peristiwa terkini atau membicarakan kontrak kerjasama. Gambaran tentang hal ini lihat tabel 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Kunjungan Pejabat Setingkat Menteri atau di Atasnya

No.	Periode	Jumlah Kunjungan
1.	2008-2009	8
2.	2010-2011	9
3.	2012-2013	11
4.	2014-2015	14

Sumber: Diolah dari laporan Kedutaan Besar Thailand di Jakarta, 2016.

Sekalipun antara Indonesia-Thailand belum ada persetujuan kebudayaan yang mengatur hubungan sosial budaya, namun keinginan untuk meningkatkan hubungan dengan Thailand di bidang ini cukup besar. Bidang-bidang yang sering digarap dalam kerjasama ini antara lain bidang

pendidikan, ilmu pengetahuan, kemahasiswaan, kesenian, olahraga, keagamaan, kesehatan, lingkungan sosial, pertukaran kunjungan/undangan tokoh-tokoh dan pejabat-pejabat negara, swasta dan kepramukaan.

Kemudian pada bidang lainnya, hubungan dan kerja sama kedua negara di bidang pertahanan dan keamanan berlangsung dengan baik. Hal ini tercermin dari tingginya komitmen untuk saling tukar kunjungan rutin antara pimpinan Angkatan Bersenjata kedua negara, latihan bersama, seminar dan pertukaran informasi, serta pertukaran siswa dalam rangka pendidikan Sekolah Staf Komando. Selain itu, kedua negara telah memiliki kesepakatan dalam pemberantasan perdagangan obat terlarang di bawah payung kerja sama *MoU between the Office of the Narcotics Control Board of the Kingdom of Thailand and the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia on the Cooperation in Controlling Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, their Precursors and Chemicals, and Drug Abuse*, antara Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dengan *Office of Narcotics Control Board (ONCB) Thailand*. Koordinasi dan kerja sama Badan Intelijen Negara (BIN) RI dengan *National Intelligence Agency (NIA) Thailand* juga berjalan dengan baik, di mana kedua pihak mempertahankan dan berupaya meningkatkan hubungan yang lebih erat.

Melalui uraian di atas maka dapat dipahami bahwa Thailand merupakan salah satu negara yang memiliki karakteristik sejarah yang unik. Kemudian pada bidang politik, negara ini menggunakan sistem monarki konstitusional, dimana Raja hanya menjadi simbol pemersatu bangsa Thailand, sedangkan politik-pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri pada tahun 1997, Thailand dihadapkan pada krisis ekonomi yang menyebabkan perekonomian ini mengalami depresiasi yang luar biasa. Kemudian melalui pemulihan konflik secara terencana dan sistematis di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Thaksin Sinawatra kemudian perekonomian Thailand berhasil dipulihkan salah satunya melalui sektor pariwisata.

Keberadaan Thailand sebagai salah satu negara di wilayah Asia Tenggara kemudian menjadi pertimbangan bagi pihak Indonesia untuk menjalankan berbagai kerjasama bilateral, termasuk pada sektor pariwisata. ini disebabkan karena posisi geografis Indonesia yang terletak di wilayah equator (khatulistiwa) dan terdiri dari ribuan pulau menjadikan negara ini memiliki keanekaragaman budaya sebagai tolok ukur kemajuan pariwisata nasional. Pada bab selanjutnya (bab III) akan diuraikan lebih lanjut tentang deskripsi bidang pariwisata Indonesia.

